
**ANALISIS PERENCANAAN PROGRAM KERJA, PENGADAAN
BARANG & JASA, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP REALISASI ANGGARAN
(Studi Empiris pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika)**

Prihantini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I
prihantini19@gmail.com

Lita Dharmayuni

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I
litadharmayuni@gmail.com

***ABSTRACT:** This research aims to Anylisis (1) program and budget planning on budget realization in the Directorate General of post and Information technology, (2) Goods and services procurement on budget realization in the Directorate General of post and Information technology, (3) Human resourcescompetence on budget realizationin the Directorate General of post and Information technology, as well as (4) Analysis of Program and budget planning, Goods and services procurement, and Human resources competence together on Realization of budgets in the Directorate General of post and Information technology. The population in this research is all employees of Directorate General of Post and Information technology. The number of samples taken is all units of work in the Directorate General of post and Information technology, the number of respondents in this study as many as 65 employess scattered in the work unit in the Directorate General of post and Information technology. Data collection techniques used in this research is purposive sampling. A data analysis method used in this research is descriptive statistics, data quality test,data normality test,classic assumption test, , and hypothesis test. The results showed that there is influence between the Analysis of Program and planningbudget (X 1) on budget realization (Y) and $p\text{-value } 0.016 < 0.05$. Goods and services procurement (X 2) to budget realization (Y) and $p\text{-value } 0.002 < 0.05$. And Human resourcescompetence (X 3) on bugdet realization (Y) and $p\text{-value of } 0.038 < 0.05$.*

***Keywords:** Program and planning budget, Goods and services procurement, and Human resources competence*

PENDAHULUAN

Anggaran negara merupakan motor penggerak yang digunakan oleh Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan. Dalam pengertiannya, anggaran menurut Lee dan Johnson dalam Suhartono (2011) adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan

anggaran Negara yang disusun setiap tahunnya di Indonesia. Oleh karena itu APBN memiliki peran yang sangat penting karena menjadi alat utama bagi Negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam membangun perekonomian suatu negara, Pemerintah mempunyai dua instrumen penting yaitu melalui Kebijakan fiskal dan kebijakan Moneter. Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran Pemerintah. Pada dasarnya pengeluaran Pemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Dalam struktur APBN, pengeluaran Pemerintah mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, pelayanan perizinan, transportasi, serta infrastruktur seperti jalan, Tugu Pos, BTS dan fasilitas umum lainnya.

Reformasi keuangan Negara di Indonesia pada tahun 2003 ditandai dengan Pemerintah menerbitkan tiga paket Undang - Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU NO. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan reformasi penganggaran di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang - Undang Keuangan Negara, telah diisyaratkan bahwa dalam melaksanakan penyusunan anggaran Pemerintah harus didasarkan pada pendekatan kinerja yang pada intinya menitikberatkan pada terciptanya efisiensi dan efektivitas rencana kerja dan anggaran pada masing - masing Kementerian/ Lembaga (Syakhroza, 2008).

Dalam rangka mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan Negara, ketiga paket Undang - Undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara (Susanto, 2006). Untuk itu diperlukan proses realisasi belanja anggaran yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dalam praktek pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yang mengusung semangat reformasi keuangan negara tersebut masih sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya keterlambatan realisasi dana APBN oleh Kementerian/ Lembaga Negara dan satuan kerja di bawahnya masih terjadi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir belanja Kementerian/ Lembaga Negara telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik realisasi yang rendah di Semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan. Pola tersebut terjadi baik di tingkat Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka hal ini akan mengganggu rencana kinerja Kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum. Sedangkan di sisi lain juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.

Penelitian Edward James Siangar (2016), Carlin Tasya Putri (2014), Prasetyo Adi Priatno (2013), dan Herriyanto (2012), Iwan Dwi Kuswoyo (2011) menunjukkan bahwa Perencanaan merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap Realisasi anggaran.

Penelitian Carlin Tasya Putri (2014), Prasetyo Adi Priatno (2013), Herriyanto (2012), dan Iwan Dwi Kuswoyo (2011) menunjukkan bahwa Pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara signifikan terhadap Realisasi anggaran.

Penelitian Edward James Siangar (2016), Carlin Tasya Putri (2014), dan Herriyanto (2012) menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Realisasi anggaran. Sedangkan penelitian Prasetyo Adi Priatno (2013) mengemukakan bahwa administrasi dan SDM tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

REVIEW LITERATUR & HIPOTESIS

Realisasi Anggaran. Menurut Munandar Realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget (2012). Sedangkan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian : 2001, 79). Anggaran ini merupakan cerminan dari apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kebijakan. Di dalam anggaran terdiri dari pos penerimaan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap masyarakat. Secara lebih detail anggaran mempunyai beberapa fungsi (Bastian: 2001, 80), antara lain : (1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. (2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. (3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. (4) Anggaran sebagai pengendali unit kerja. (5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. (6) Anggaran merupakan instrumen politik. (7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Analisis Perencanaan Program Kerja.Perencanaan menurut UU nomor 25 tahun 2004 yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan Rencana Kerja menurut Gunawan Adisaputro (2010) adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksanaannya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang

digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil.

Manfaat perencanaan atau rencana kerja menurut Gunawan Adisaputro (2010:309) yaitu sebagai berikut : (1) Perencanaan sebagai pengarah untuk meraih atau mendapatkan sesuatu secara lebih terkoordinasi. (2) Perencanaan meminimalisasi ketidakpastian, karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian bagi organisasi atau perusahaan. (3) Perencanaan meminimalisasi pemborosan sumber daya, setiap organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan sumber daya. Dengan adanya perencanaan sebuah organisasi atau perusahaan diawal sudah melakukan perencanaan melalui sumber daya. Sehingga diharapkan tidak terjadi pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada sehingga organisasi tersebut bisa meningkatkan tingkat efisiensinya. (4) Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan perusahaan berusaha membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan dan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

Perencanaan kegiatan tahunan oleh Kementerian/ Lembaga dituangkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L). Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP.

Penyusunan Renja K/L dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang didalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak K/L. Matrik Rencana Tindak K/L merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan yang terdiri dari Rupiah Murni, PHLN (Pinjaman Hutang Luar Negeri), PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), BLU (Badan Layanan Umum), PDS dan SBSN yang tidak dapat dilampai.

Selanjutnya berdasarkan PP No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, maka dalam penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/ Lembaga harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (trilateral meeting) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Renja K/L yang telah disusun Kementerian/ Lembaga, kemudian disampaikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga kepada Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu.

Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah. Menurut Peraturan Presiden (PP) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.

Prosedur pengadaan barang (aset) milik negara/ daerah menurut Mahmudi (2011:238) adalah sebagai berikut : (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang Milik Negara/ Daerah dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisais pendayagunaan serta tertib inventarisasi. (2) Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/ pemborong pekerjaan, swakelola hibah/ sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna-usaha. (3) Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. (4) Pengadaan Barang Milik Negara harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang panjang, dari proses perencanaan penganggaran, proses pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dengan anggaran yang sudah direncanakan, dan pertanggungjawaban hasil dari pengadaan barang dan jasa secara administrasi dan teknis. Beberapa peraturan yang mendasari pelaksanaan barang dan jasa antara lain: (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 (tentang jasa konstruksi) dan peraturan Pemerintah 29 tahun 2010 (tentang penyelenggaraan jasa konstruksi) merupakan peraturan jasa konstruksi yang mendasari pengadaan barang dan jasa. (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam memakmurkan rakyat. (c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 mengenai Pengelolaan barang milik negara menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan. Menurut peraturan ini pula pengadaan barang dan jasa harus transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak diskriminatif. (d) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuan diberlakukannya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN dilakukan secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Jika tujuan tercapai maka pemerintah akan diuntungkan dari sisi penggunaan anggaran.

Kompetensi Sumber Daya Manusia. Menurut Wibowo (2008) Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu : (1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). (2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. (3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/ non financial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak terjadi seperti pada aspek ekonomi, dimana adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola anggaran. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik.

Hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan teori yang mendasari, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh positif Perencanaan Program Kerjaterhadap Realisasi Anggaran di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (2) Terdapat pengaruh positif Pengadaan barang & jasa terhadap Realisasi Anggaran di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (3) Terdapat pengaruh positif Kompetensi Sumber daya manusia terhadap Realisasi Anggaran di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. (4) Terdapat pengaruh Perencanaan program kerja, Pengadaan barang & jasa dan Kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap Realisasi Anggaran di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

METODE

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan

memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 2006: 47). Populasi untuk penelitian ini adalah 7 (tujuh) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari : (1) Sekretariat Direktorat Jenderal PPI, (2) Direktorat Pos, (3) Direktorat Telekomunikasi, (4) Direktorat Penyiaran, (5) Direktorat Pengendalian, (6) Direktorat Pengembangan Pitalebar, dan (7) Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu suatu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kriteria pengambilan sampel adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang bersedia untuk di survey, serta yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai di satuan kerja di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Dalam penelitian ini sampel yang di ambil adalah seluruh satuan kerja di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Metode Analisis Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau survey dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala Ordinal 5 point yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini yaitu pegawai di satuan kerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatikasebanyak 65 responden.

Statistik Deskriptif. Analisis deskripsi ini meliputi tabel rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah penelitian. Berikut ini adalah hasil analisis deskripsi dengan program SPSS versi 23 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

		Statistics			
		Perencanaan Program Kerja (X1)	Pengadaan barang & jasa	Kompetensi SDM	Realisasi Anggaran
N	Valid	65	65	65	65
	Missing	0	0	0	0
	Mean	35,03	34,26	34,74	33,37
	Std. Deviation	3,274	3,169	3,501	3,525
	Range	17	14	18	15
	Minimum	23	26	22	25
	Maximum	40	40	40	40

uSumber: data primer yang diolah (2017)

Uji Kualitas Data. Dalam penelitian ini teknis uji kualitas data yang digunakan adalah Uji Reliabilitas, yang dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur stabilitas kuesioner digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001 : 47). Dalam penelitian uji reliabilitas ini, digunakan metode Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,70 maka pertanyaan tersebut reliable, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Realisasi Anggaran (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,795	8

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Realisasi Anggaran (Y) memiliki Cronbach's Alpha 0,795 > 0,70 sehingga ditarik kesimpulan bahwa semua pertanyaan dari variabel realisasi anggaran (Y) dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Perencanaan Program Kerja (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,843	8

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Program Kerja (X1) memiliki Cronbach's Alpha 0,843 > 0,70 sehingga ditarik kesimpulan bahwa semua pertanyaan dari variabel Perencanaan Program Kerja (X1) dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Pengadaan Barang & Jasa (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,809	8

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Pengadaan Barang & Jasa (X2) memiliki Cronbach's Alpha 0,809 > 0,70 sehingga ditarik kesimpulan bahwa semua pertanyaan dari variabel Pengadaan Barang & Jasa (X2) dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,829	8

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) memiliki Cronbach's Alpha 0,829 > 0,70 sehingga ditarik kesimpulan bahwa semua pertanyaan dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian berikutnya.

Uji Normalitas Data. Uji normalitas data dilakukan untuk meyakinkan bahwa sampel yang diujikan berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, teknik uji normalitas data yang digunakan adalah uji statistik non parametik *one sample kolmogrov smirnov test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji dengan taraf signifikan 5%.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data One Sample Kolmogrov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,57218097
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,051
	Negative	-,077
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

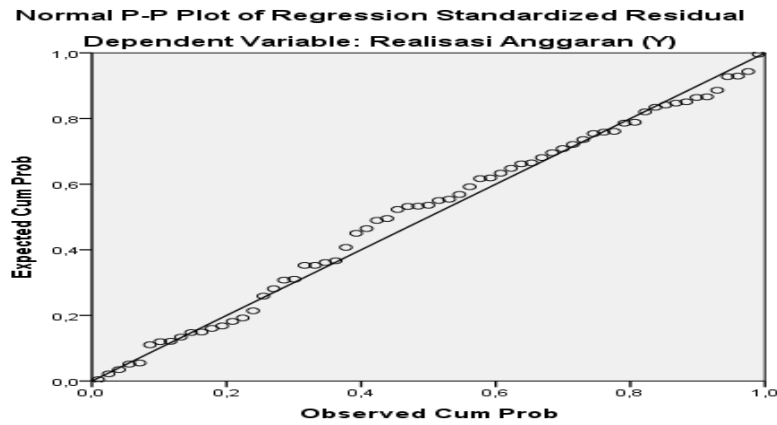
Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 2. Hasil uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *asyp. Sig.* bernilai 0,20 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Unstandardized Residual* yang berdistribusi normal, yang menunjukkan data baik layak untuk digunakan dalam model regresi.

Analisis Uji Asumsi Klasik. Untuk memperoleh hasil pengujian baik, maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif.

Asumsi klasik yang diuji yaitu Normalitas Regresi, Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas.

Gambar 1. Hasil Uji P Plot (Normalitas Regresi)



Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan gambar 1 grafik normal P-P Plot menunjukkan bahwa sebaran titik-titik residual berada disekitar garis normal. Hal ini terjadi karena titik residual tersebut berasal dari data dengan distribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi persyaratan normalitas regresi.

Tabel 7. Coefisients (Uji Multikolinearitas)
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Perencanaan Program Kerja (X1)	,225	4,445
Pengadaan Barang dan Jasa (X2)	,231	4,332
Kompetensi SDM (X3)	,219	4,563

a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel independen yaitu Perencanaan Program Kerja 0.225, Pengadaan Barang & Jasa 0.231, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 0.219. Dapat disimpulkan bahwa semua nilai tolerance variabel independen berada di atas 0,10 (menurut Heir Et Al dalam Dwi Priyanto : 2009, Farmakoterapi dan Teknologi Medis). Nilai variance inflation factor (VIF) untuk masing-masing variabel independen yaitu Perencanaan program kerja 4.445; Pengadaan barang & jasa 4.332; dan Kompetensi sumber daya manusia 4.563. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen tersebut.

Tabel 8. Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,895 ^a	,801	,791	1,610	2,357

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), Pengadaan Barang dan Jasa (X2), Perencanaan Program Kerja (X1)

b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

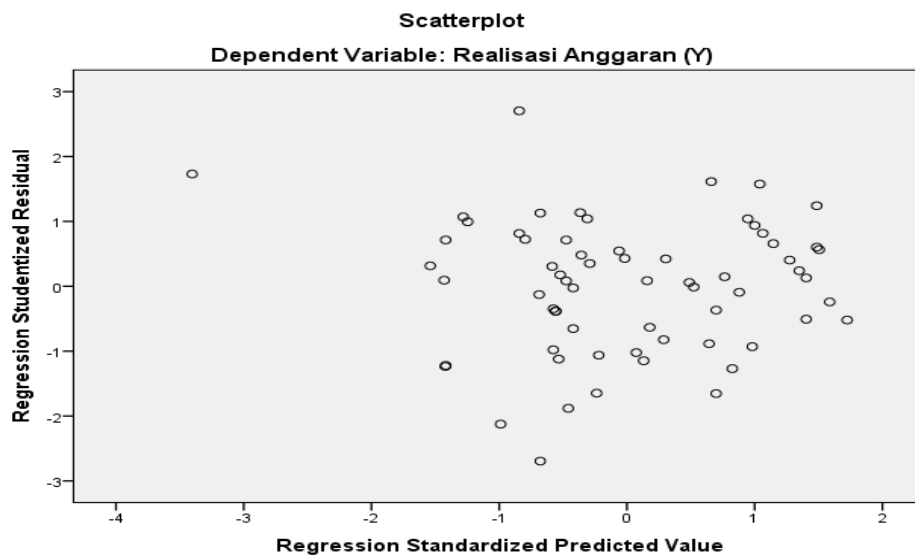
a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Nilai Durbin-Watson sebesar 2,357. Menurut Santoso 2005 (pada buku Statistik Multivariat konsep dan aplikasi dengan SPSS Jakarta) cara yang dapat digunakan dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji Durbin Watson, nilai DW yang didapat akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan keputusan sebagai berikut :

- Jika angka Durbin Watson berada dibawah angka -2, berarti ada autokorelasi positif.
- Jika angka Durbin Watson berada diantara angka -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika angka Durbin Watson di atas angka +2, berarti tidak ada autokorelasi negatif.
- Jadi, nilai Durbin-Watson 2,357 berada di angka +2 maka dapat disimpulkan bahwa dari angka Durbin-Watson tidak ada autokorelasi negatif.

Gambar 2. Uji Scatterplot (Uji Heteroskedastisitas)



Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan grafik scatterplot di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga linier layak digunakan untuk memprediksi Realisasi Anggaran di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika berdasarkan masukan variabel independen Perencanaan program kerja, Pengadaan barang & jasa, dan Kompetensi sumber daya manusia.

Analisis Pengujian Hipotesis.

Hipotesis Pertama : Perencanaan program kerja (X_1) berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran (Y)

**Tabel 9. Uji Korelasi Sederhana
Perencanaan program kerja (X_1) terhadap Realisasi anggaran (Y)
Correlations**

		Perencanaan Program Kerja (X_1)	Realisasi Anggaran (Y)
Perencanaan Program Kerja (X_1)	Pearson Correlation	1	,844**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	65	65
Realisasi Anggaran (Y)	Pearson Correlation	,844**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS dapat diketahui nilai koefisien Bivariated antara Realisasi anggaran (Y) sebesar 0.844, ini menunjukkan adanya hubungan sedang antara Perencanaan program kerja (X_1) dengan Realisasi anggaran (Y).

Uji Regresi Parsial

Perumusan hipotesis :

H_0 : $\beta_1 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara Perencanaan program kerja dengan Realisasi anggaran.

H_0 : $\beta_1 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh signifikan antara Perencanaan program kerja dengan Realisasi anggaran.

Signifikan jika : < 0.05 ; signifikan H_0 ditolak, H_a diterima ; > 0.05 ; signifikan H_0 diterima, H_a ditolak.

**Tabel 10. Uji Regresi Parsial
Perencanaan program kerja (X1) terhadap Realisasi anggaran (Y)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,539	2,560		,601	,550
	Perencanaan Program Kerja (X1)	,909	,073	,844	12,487	,000

a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan perhitungan di atas didapat nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, antara ikatan Perencanaan program kerja (X1) dengan Realisasi anggaran (Y) terdapat pengaruh yang signifikan.

**Tabel 11. Koefisien Determinasi
Pengaruh Perencanaan program kerja (X₁) terhadap Realisasi anggaran (Y)**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,844 ^a	,712	,708	1,906

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Program Kerja (X1)

b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

$$KD = R^2 \times 100 \% = \dots \%$$

$$KD = 0,844^2 \times 100 \% = 71,23 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas koefisien determinasi sebesar 71,23%, artinya perencanaan program kerja mempengaruhi Realisasi anggaran sebesar 71,23%, dan sisanya 28,77% dipengaruhi faktor lain.

Hipotesis Kedua : Pengadaan barang & jasa (X₂) berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran (Y)

Tabel 12. Uji Korelasi Sederhana
Pengadaan barang & jasa (X₂) terhadap Realisasi anggaran (Y)

		Pengadaan Barang dan Jasa (X ₂)	Realisasi Anggaran (Y)
Pengadaan Barang dan Jasa (X ₂)	Pearson Correlation	1	,857**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	65	65
Realisasi Anggaran (Y)	Pearson Correlation	,857**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS dapat diketahui nilai koefisien Bivariated antara Realisasi anggaran (Y) sebesar 0.857, ini menunjukkan adanya hubungan sedang antara Pengadaan barang & jasa (X₂) dengan Realisasi anggaran (Y).

Tabel 13. Uji Regresi Parsial
Pengadaan barang & jasa (X₂) terhadap Realisasi anggaran (Y)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,698	2,483		,281	,779
	Pengadaan Barang dan Jasa (X ₂)	,954	,072	,857	13,212	,000

a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan perhitungan di atas didapat nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, antara ikatan Pengadaan barang & jasa (X₂) dengan Realisasi anggaran (Y) terdapat pengaruh yang signifikan.

Tabel 14. Koefisien Determinasi Pengaruh pengadaan barang & jasa (X₂) terhadap Realisasi Anggaran (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,857 ^a	,735	,731	1,829

a. Predictors: (Constant), Pengadaan Barang dan Jasa (X₂)

b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

$$KD = R^2 \times 100 \% = \dots \%$$

$$KD = 0.857^2 \times 100\% = 73,50\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas koefisien determinasi sebesar 73,50%, artinya Pengadaan barang & jasa mempengaruhi Realisasi anggaran sebesar 73,50%, dan sisanya 26,50% dipengaruhi faktor lain.

Hipotesis Ketiga : Kompetensi sumber daya manusia (X₃) berpengaruh terhadap realisasi anggaran (Y)

Tabel 15. Uji Korelasi Sederhana Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃) terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Correlations

		Kompetensi SDM (X ₃)	Realisasi Anggaran (Y)
Kompetensi SDM (X ₃)	Pearson Correlation	1	,840**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	65	65
Realisasi Anggaran (Y)	Pearson Correlation	,840**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS dapat diketahui nilai koefisien Bivariated antara Realisasi anggaran (Y) sebesar 0.840, ini menunjukkan adanya hubungan sedang antara Pengadaan barang & jasa (X₂) dengan Realisasi anggaran (Y).

**Tabel 16. Uji Regresi Parsial
Kompetensi sumber daya manusia (X₃) terhadap Realisasi anggaran (Y)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,001	2,404		1,664	,101
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃)	,845	,069	,840	12,277	,000

a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Berdasarkan perhitungan di atas didapat nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, antara ikatan Pengadaan barang & jasa (X₂) dengan Realisasi anggaran (Y) terdapat pengaruh yang signifikan.

**Tabel 17. Koefisien Determinasi
Kompetensi sumber daya manusia (X₃) terhadap Realisasi Anggaran (Y)**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,840 ^a	,705	,701	1,929

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃)

b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

$$KD = R^2 \times 100 \% = \dots \%$$

$$KD = 0.840^2 \times 100\% = 70,50\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas koefisien determinasi sebesar 70,50%, artinya Pengadaan barang & jasa mempengaruhi Realisasi anggaran sebesar 70,50%, dan sisanya 29,50% dipengaruhi faktor lain.

Hipotesis Keempat : Perencanaan program kerja (X₁), Pengadaan barang & jasa (X₂), Kompetensi sumber daya manusia (X₃) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Realisasi Anggaran (Y).

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 23.0 dapat diketahui nilai koefisien korelasi antara Perencanaan program kerja (X₁), Pengadaan barang & jasa (X₂), Kompetensi sumber daya manusia (X₃) dengan Realisasi Anggaran (Y) sebesar 0,895 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara Perencanaan program kerja (X₁), Pengadaan barang & jasa (X₂), Kompetensi sumber daya manusia (X₃) dengan Realisasi Anggaran (Y).

Tabel 18. Uji Analisis Korelasi Berganda
Analisis Perencanaan program kerja (X1), Pengadaan barang & jasa (X2),
Kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,895 ^a	,801	,791	1,610

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), Pengadaan Barang dan Jasa (X2), Perencanaan Program Kerja (X1)

b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Analisis Regresi Berganda : Konstan α sebesar -1,693 menyatakan bahwa jika nilai Perencanaan program kerja, Pengadaan barang & jasa, Kompetensi sumber daya manusia, maka nilai Realisasi anggaran sebesar -1,693. Koefisien Perencanaan program kerja memiliki 0,320 artinya jika setiap kenaikan 1% perencanaan program kerja sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan menurunkan Realisasi Anggaran sebesar 0,320. Koefisien Pengadaan barang & jasa memiliki 0,432 artinya jika setiap kenaikan 1% Pengadaan barang & jasa sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan menurunkan Realisasi Anggaran sebesar 0,432. Koefisien Kompetensi sumber daya manusia memiliki 0,260 artinya jika setiap kenaikan 1% Kompetensi sumber daya manusia sedangkan nilai variabel lain tetap, maka akan menurunkan Realisasi Anggaran sebesar 0,260.

Tabel 19
Analisis Regresi Berganda
Analisis Perencanaan program kerja (X1), Pengadaan barang & jasa (X2),
Kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap Realisasi Anggaran (Y)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,693	2,266		-,747	,458
	Perencanaan Program Kerja (X1)	,320	,130	,298	2,472	,016
	Pengadaan Barang dan Jasa (X2)	,432	,132	,388	3,266	,002
	Kompetensi SDM (X3)	,260	,123	,258	2,118	,038

a. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -1,693 + 0,320 X1 + 0,432 X2 + 0,260 X3 + e$$

Koefisien Determinasi :

Tabel 4.31
Koefisien Determinasi
Analisis Perencanaan program kerja (X1), Pengadaan barang & jasa (X2),
Kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap Realisasi Anggaran (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,895 ^a	,801	,791	1,610

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), Pengadaan Barang dan Jasa (X2), Perencanaan Program Kerja (X1)

b. Dependent Variable: Realisasi Anggaran (Y)

Sumber: data primer yang diolah (2017)

$$KKD = 0,8952 \times 100\% = 80,10\%$$

Koefisien determinasi sebesar 80,10% artinya bahwa Realisasi Anggaran dipengaruhi oleh Perencanaan program kerja Pengadaan barang & jasa, Kompetensi sumber daya manusia terhadap Realisasi anggaran sebesar 80,10% dan sisanya sebesar 19,90% dipengaruhi oleh faktor lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

(1) Terdapat pengaruh signifikan antara Perencanaan program kerja terhadap Realisasi anggaran, yaitu denganyaitu dengan p-value sebesar 0.016 atau lebih kecil dari tingkat signifikan α (5%), yang berarti bahwa berpengaruh terhadap Realisasi anggaran(2) Terdapat pengaruh antara Pengadaan barang & jasa terhadap Realisasi anggaran, yaitu dengan p-value sebesar 0.002 atau lebih kecil dari tingkat signifikan α (5%), yang berarti bahwa pengadaan barang & jasa berpengaruh terhadap Realisasi anggaran(3) Terdapat pengaruh antara Kompetensi sumber daya manusia terhadap Realisasi anggaran, yaitu dengan p-value sebesar 0.038 atau lebih besar dari tingkat signifikan α (5%), yang berarti bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Realiasasi anggaran(4) Besaran pengaruh variabel Perencanaan program kerja, Pengadaan barang & jasa, dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap Realisasi anggaran adalah sebesar 80,1% sedangkan sisanya sebesar 18,9% dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Adi, P. Prasetyo. 2013. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Adisaputro, Gunawan. 2010. *Manajemen Pemasaran: Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran*. Edisi pertama. Yogyakarta.
- Arif, Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bunga Rampai. PT. Fajar Interpratama Offset. Semarang.

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPF.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heckert dan Wilson yang diterjemahkan Gunawan Hutauruk. 2010. *Controlship*. Bandung : Alfabeta.
- Herriyanti. 2012. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga di Wilayah Jakarta atas 97 Variabel*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Iwan Dwi Kuswoyo. 2011. *Faktor-faktor Penyebab Penumpukan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri*. Kediri : Universitas Kadir.
- James, S. Edward. 2016. *Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Balitbang Hukum dan Ham Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Miliasih. 2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga TA 2010 di Wilayah Permbayaran KPPN Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Riau.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi. Salemba Empat : Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indoneisa. 2004. *Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*. Jakarta.
-

- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2016. Jakarta : Bappenas.
- Republik Indonesia. 2016. Realisasi Anggaran Tahun 2016 di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta : Kominfo.
- Ryan, Albert. 2011. Buku Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa. Gradien Mediatama. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suhartono. 2011. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel). Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Susanto, Heru. 2006. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam mewujudkan Good Governance. Jurnal Sosial & Humaniora, Vol. 02 (No.01) : 1-15.
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UMS.
- Syakhroza, Akhmad. 2008. Telaah Governance Sistem Keuangan Negara. Jurnal Usahawan, (No.05) TH XXXVII : 37-40.
- Tasya, P. Carlin. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bengkulu : Universitas Bengkulu.
- Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.